



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



0711-518757



dkp@dislutkan.sumselprov.go.id



dislutkan.sumselprov.go.id



[dkp_provinsi_sumsel](https://www.instagram.com/dkp_provinsi_sumsel)

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang menyajikan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan yang dilakukan instansi pemerintah. Pengukuran IKU tersebut merupakan tolak ukur penilaian pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan bahan evaluasi pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan pada tahun tersebut, sehingga dokumen ini merupakan salah satu dasar perencanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di masa-masa mendatang, sehingga program dan kegiatan akan mencapai hasil yang lebih baik.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2025 ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar LKjIP ini bisa bermanfaat dan berguna sebagai bahan penyusunan program dan rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C
NIP. 196811201989031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur organisasi dan Tata Kerja	3
1.3 Aspek Strategis serta permasalahan utama	10
1.4 Landasan Hukum	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
Bab 2. Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	17
2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2025	20
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	24
3.1.1 Indikator Kinerja Utama	24
3.2 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025	34
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	36
Bab 4. Penutup	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025	18
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	20
Tabel 3. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.....	20
Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ke – 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2026	22
Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ke – 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2026	23
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	24
Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2025.....	24
Tabel 8. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	25
Tabel 9. Perbandingan Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan capaian Nasional.....	25
Tabel 10 Perbandingan NTN dari Tahun 2021 - 2025.....	29
Tabel 11 Perbandingan NTN Provinsi Sumatera Selatan dengan Standar Nasional Tahun 2025	30
Tabel 12. Perbandingan NTPi dari Tahun 2021 - 2025	32
Tabel 13. Perbandingan NTPi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025.....	33
Tabel 14 Perbandingan Nilai AKI dari Tahun 2021 - 2025.....	35
Tabel 15. Perbandingan AKI Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025.	35
Tabel 16 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	36
Tabel 17 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan sasaran.....	39

Tabel 20 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	40
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	9
Gambar 2. Target dan Realisasi Produksi Tangkap Sumsel Tahun 2025	27
Gambar 3. Capaian NTN dari Tahun 2021-2025.....	27
Gambar 4. NTN Sumatera Selatan 5 tahun terakhir	29
Gambar 5. Target dan Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2025	31
Gambar 6. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir	33
Gambar 7. Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025	34

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fokus pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan, sehingga mempunyai manfaat untuk program dan kegiatan yang mengacu pada segi efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya menghasilkan nilai manfaat yang baik bagi masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi tumpuan dalam mewujudkan tiga pilar pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi andalan untuk peningkatan produksi perikanan dalam rangka penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sesuai dengan Visi misi Gubernur Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA, Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung misi 2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, misi ke 3 Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim dan misi ke 5 Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan. ini sesuai

dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Arah kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan dalam kerangka RPJMD, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai tujuan utama. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai tukar pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yang diukur melalui dua indikator utama: Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Kedua indikator ini mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pelaku usaha, serta menjadi tolok ukur kesejahteraan mereka.

Target tahunan untuk NTN dari 117,50 pada tahun 2025 hingga 119,50 pada tahun 2030, menandakan harapan peningkatan daya beli dan pendapatan nelayan. Sementara itu, Target NTPi juga mengalami kenaikan dari 94,32 di tahun 2025 hingga 95,10 di tahun 2030. Secara keseluruhan, target dari indikator diatas menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan melalui pendekatan berbasis kesejahteraan pelaku utama.

Paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang lebih diarahkan kepada paradigma baru, yaitu pembangunan perikanan yang difokuskan pada kegiatan : (1) budidaya perikanan, (2) rasionalisasi perikanan tangkap (kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum yang diarahkan pada penggunaan alat tangkap yang tidak membahayakan lingkungan perairan dan kelestarian sumberdaya perikanan, serta peningkatan mutu hasil tangkapan, (3) peningkatan mutu hasil dan nilai tambah produk hasil perikanan dan (4) pemeliharaan dan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan. Untuk mewujudkan paradigam pembangunan sektor kelautan perikanan tersebut,

maka diperlukan perencanaan strategis dan evaluasi dalam setiap program dan kegiatannya.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Kinerja ini adalah bentuk monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan sektor perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.
- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
 - 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya
- e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil
 3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, yaitu :
1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.

Fungsi :

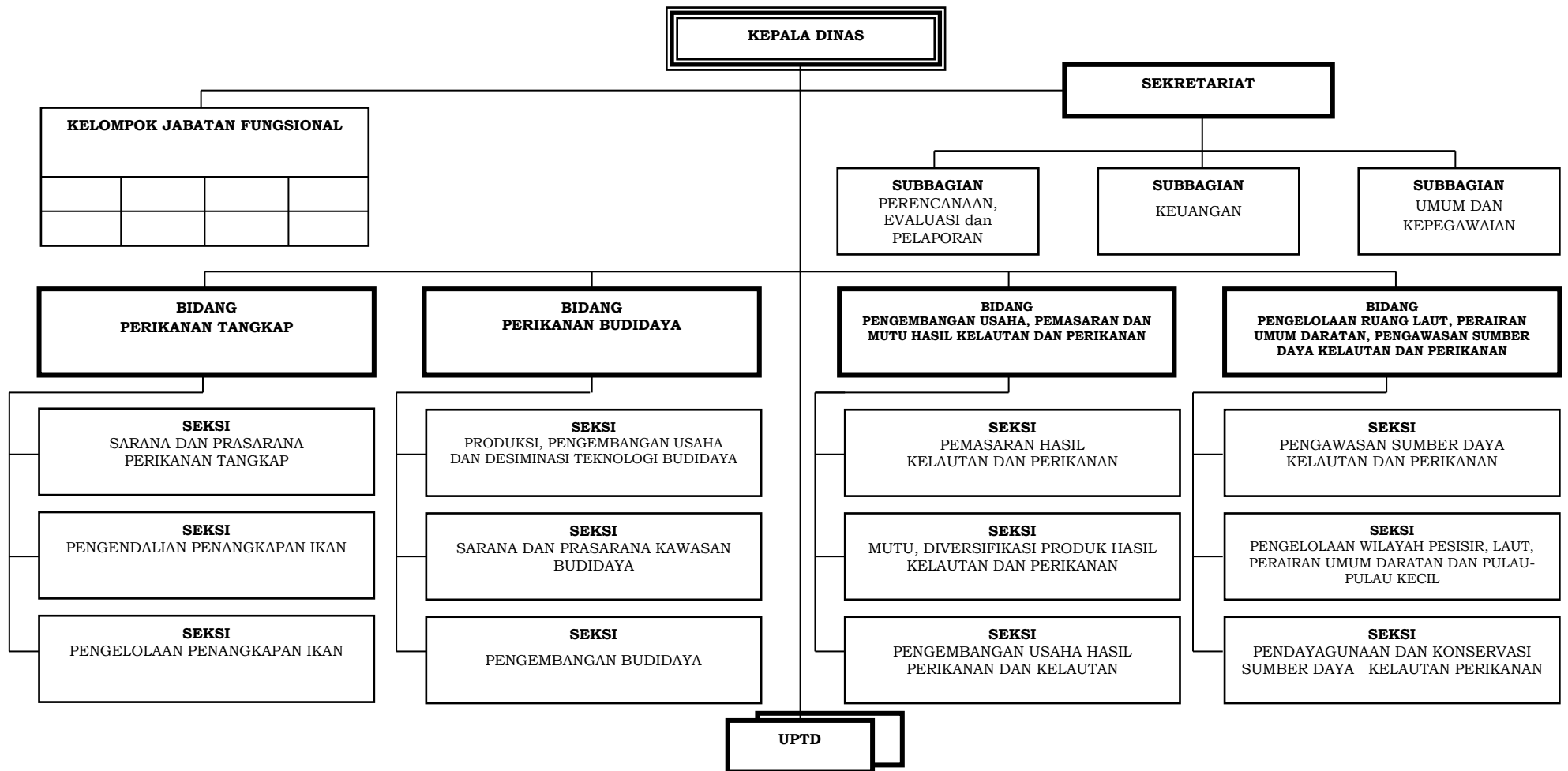
- Penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
- Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
- Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
- Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;

- Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
 - Penyampaian laporan kegiatan UPTD;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksanaan serta Fungsional;
 - Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.
 - Fungsi :
 - Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
 - Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;
 - Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
 - Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana Fungsional;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Pelabuhan Perikanan Sungsang

- Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sungsang.
- Fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book);
 - Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
 - Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
 - Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar ;
 - Pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha;
 - Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
 - Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.



Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Peran strategis instansi pemerintah pada umumnya diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kewenangan Dekonsentrasi. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Institusi pemerintahan sendiri berperan nyata kepada 3 (tiga) sektor, yaitu pemerintah sendiri, sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat. Tiga sektor tersebut saling berkorelasi dan bersinergi dalam menjalankan perannya masing-masing, sehingga diharapkan terjadi proses pembangunan yang baik dan berdampak positif bagi semua pihak.

Pemerintah mempunyai tugas dan fungsi utama bagi proses pembangunan di suatu negara, yaitu menciptakan lingkungan politik yang demokratis serta menjamin adanya kepastian dan penegakan supremasi hukum. Sektor swasta sebagai pemilik modal untuk menjalankan roda ekonomi mempunyai fungsi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan dan ditunjang dengan pemenuhan hak tenaga kerja. Masyarakat mempunyai fungsi aktif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Hubungan sinergi, konstruksi dan positif antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat luas dalam menciptakan *good governance* mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Partisipasi atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta partisipasi secara konstruktif
2. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen

3. Transparansi atas dasar kebebasan informasi yang dapat dipahami dan dipantau
4. Kesiediaan untuk melayani setiap *stakeholder*
5. Orientasi konsensus untuk menjembatani kepentingan yang berbeda dan beragam, sehingga diperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun prosedur
6. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam peningkatan kesejahteraannya
7. Efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang tersedia
8. Segala keputusan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
9. Visi Strategi harus mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan, serta sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai representative Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sistem pembagian kewenangan pengelolaan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Undang-undang otonomi daerah tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
- Pengaturan administratif.
- Pengaturan tata ruang.
- Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

Pembagian kewenangan wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan ini juga berlaku untuk aktivitas kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Adapun kegiatan perikanan tangkap Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:

- Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
- Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Sedangkan kegiatan perikanan budidaya Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang

usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan tersebut maka ada beberapa kegiatan kelautan dan perikanan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel mengalami perubahan untuk menyesuaikan peraturan perundangan – undangan tersebut.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target angka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu acuan dan dasar kebijakan atau pengambilan keputusan untuk mengarahkan pembangunan untuk lebih fokus dan teratur. Di dalam penyusunannya diperlukan perencanaan pembangunan yang baik dan berlandaskan pada faktor-faktor ekonomi, sosial politik dan budaya suatu daerah, sehingga potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Penyusunan perencanaan yang baik menggunakan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fokus pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan, sehingga mempunyai manfaat untuk program dan kegiatan mengacu pada segi efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya menghasilkan nilai manfaat yang baik. Pembangunan yang dilakukan merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029, yaitu H. Herman Deru dan H. Cik Ujang. Pelantikan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan merupakan tonggak dimulainya pembangunan Sumatera Selatan menuju era peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Guna mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih,

maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Mengacu pada RPJMD 2025 – 2029 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029 dengan tahapan-tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana kinerja memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam kurun waktu proses kinerja tersebut.

Rencana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029. Mengacu pada RPJMD tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dengan tahapan-tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL	Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan genangan Air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
	Kegiatan penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
	Kegiatan penetapan lokasi

PROGRAM KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN
	pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Penerbitan izin usaha perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu bagian yang sangat penting yang harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2026. Renstra ini mempunyai fokus pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan, sehingga mempunyai manfaat untuk program dan kegiatan mengacu pada segi efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya menghasilkan nilai manfaat yang baik.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	117,50
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Nilai	94.32
3	Meningkatnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Nilai	30,76

Tabel 3. Tabel Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tata Usaha OPD Dislutkan yang berkualitas	1 Tahun	24.251.548.085,00

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Meningkatnya tata kelola OPD yang berkualitas		
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana Pendukung		
2	Program Pengelolaan Kelautan, pesisir dan Pulau – pulau kecil	Jumlah Orang yang dibina dalam rangka penurunan ilegal fishing dan luas kawasan pesisir yang di rehabilitasi	280 Orang	Rp 351.350.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan	117,50	Rp. 2.662.606.865
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	285.750 Ton	Rp 4.083.783.351
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	94,32	
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah orang yang dibina dalam rangka penurunan Illegal Fishing dan luas kawasan konservasi	280 Orang	Rp 561.634.845
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	30,76 Kg/ Kap/ Tahun	Rp 1.334.860.144

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi ke-1

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-1 **(Memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan bertanggung jawab)**, maka tujuan yang ditetapkan adalah peningkatan produksi perikanan, dengan sasaran:

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
- Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan

Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ke-1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
		2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,43	117,50	117,87	118,18	119,50	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	94,84	94,32	94,47	94,51	95,10	
3	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	46,16	30,76	31,45	32,13	34,00	

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi ke-2

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 (**Menguatkan daya saing produk kelautan dan perikanan**), maka tujuan yang ditetapkan adalah peningkatan produk olahan perikanan, dengan sasaran:

- Meningkatkan ekspor komoditas kelautan dan perikanan; dan
- Meningkatnya konsumsi ikan.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ke-2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
		2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	46,16	30,76	31,45	32,13	34,00	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

3.1.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dibagi menjadi tiga Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Konsumsi Ikan. Capaian kinerja yang dicapai pada sektor Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan proses pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,50	115,57
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	94,32	93,15
5	Meningkatnya Konsumsi Ikan	3	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	30,76	31,9

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Nilai Tukar Nelayan/NTN	104,50	117,43	112,37	117,50	115,57	98,36
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	94,35	94,84	100,51	94,32	93,15	98,76
5	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	44,00	46,16	104,90	30,76	31,90	103,70

Sedangkan kemajuan capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	TINGKAT KEMAJUAN %
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1 Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,43	115,57	98,41
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	94,84	93,15	98,21
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan	3 Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	46,16	31,9	69,10

Untuk kemajuan capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan data nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Perbandingan Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan Capaian Nasional

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1 Nilai Tukar Nelayan/NTN	115,57	103,03	98,36
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	93,15	105,77	98,76
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan	3 Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	31,9*	26,66	103,70

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan atau yang kemudian disingkat NTN merupakan satuan yang menjadi alat ukur kesejahteraan nelayan. Angka ini diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima (IT), dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan (IB).

Secara rinci, dapat dijelaskan bahwa IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar sedangkan IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar.

Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100. NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

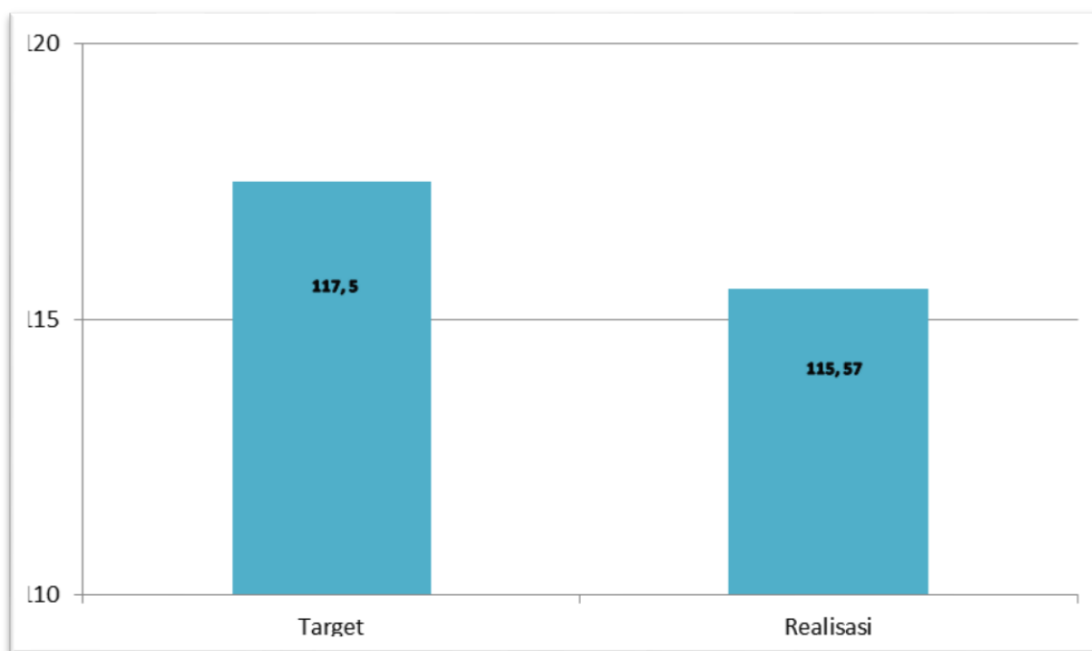
NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas.

NTN < 100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi NTN pada tahun 2023.

Pada tahun 2025 NTN Sumatera Selatan adalah 115,57 atau 98,36% dari target menunjukkan bahwa daya beli nelayan relative stabil dan berada dalam kondisi surplus. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain realtif stabilnya harga hasil tangkapan ikan di tingkat nelayan sepanjang tahun, meningkatnya permintaan pasar, baik untuk konsumsi lokal maupu antar daerah, dan adanya dukungan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada nelayan perairan umum daratan yaitu nelayan mesin perahu dan jala tebar dan nelayan laut yaitu mesin

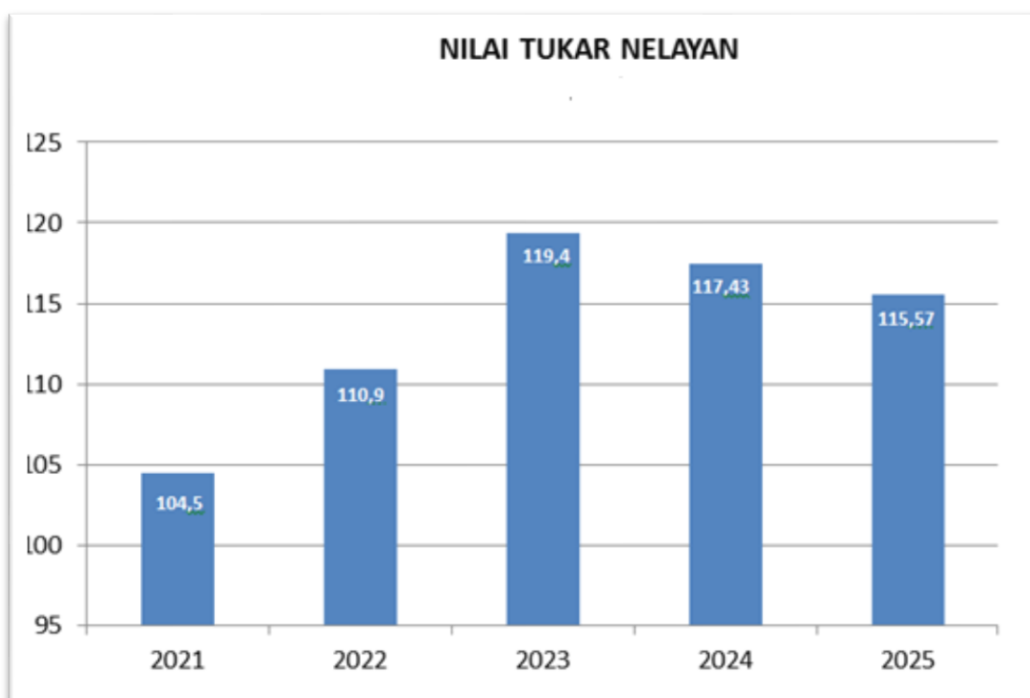
perahu laut dan jarring millennium. Namun demikian, belum tercapainya target sepenuhnya disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan rumah tangga dan logistik melaut, seperti bahan bakar, es batu, dan perbekalan, dan factor cuaca dan musim yang mempengaruhi jumlah hari melaut sehingga pendapatan nelayan belum optimal.

Gambar 2. Target dan Realisasi Produksi Tangkap Sumsel Tahun 2025



Berikut adalah grafik capaian NTN berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan :

Gambar 3. Capaian NTN dari tahun 2021-2025



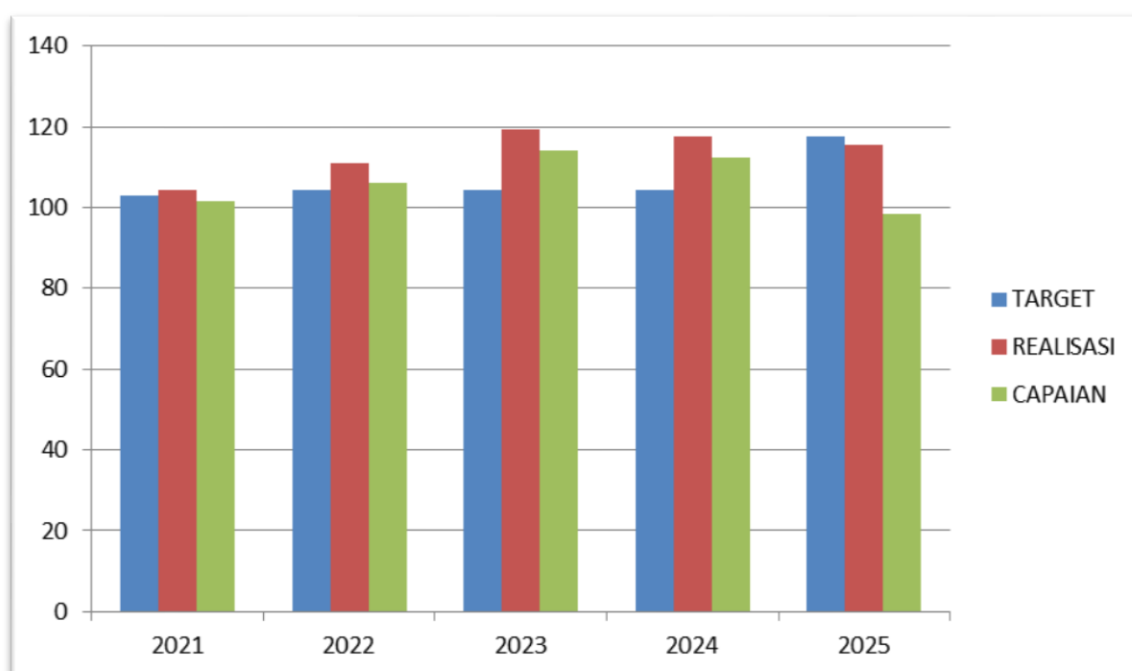
Secara konsepsional, NTN merupakan pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Adapun perbandingan nilai NTN yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan dari tahun 2021 sampai 2025 tersaji pada tabel berikut.

Berdasarkan grafik capaian tersebut bahwa NTN telah berada diatas nilai minimal yaitu 100. Keberhasilan dalam meningkatkan NTN ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Hal yang dapat dilakukan adalah mendorong peningkatan daya serap hasil produksi nelayan, yakni dengan mendorong industri perikanan untuk tetap menyerap hasil produksi dari nelayan, memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan, salah satunya adalah alat penangkapan ikan, lalu menjaga kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap sentra nelayan. Hal ini dimaksudkan agar harga BBM ditingkat nelayan tidak mengalami peningkatan dan mudah didapat. Beberapa hal ini dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tukar nelayan sehingga pemerintah dapat mencapai nilai tukar yang ditargetkan pada tahun 2025. Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2025 didukung dengan adanya program bantuan alat-alat penangkapan ikan terutama didaerah laut, sarana dan prasarana diperairan darat, pelayanan rekomendasi perizinan dan pengendalian perikanan tangkap. Ada beberapa bantuan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota terutama yang memiliki perikanan tangkap paling banyak yaitu ; Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang.

Tabel 10. Perbandingan NTN dari tahun 2021 sampai 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
102,8	104,5	104,5	110,9	104,5	119,4	104,5	117,43	117,50	115,57
101,70%		106,12%		114,26%		112,37%		98,36	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 – 2024 ini realisasi NTN sudah bisa melebihi dari yang di targetkan, namun NTN tahun 2025 mengalami penurunan diakibatkan karena terjadinya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga dan logistik melaut, seperti bahan bakar, es batu, juga perbekalan, dan faktor cuaca dan musim yang mempengaruhi jumlah hari melaut sehingga pendapatan nelayan belum optimal.



Gambar 4. NTN Sumatera Selatan 5 tahun terakhir

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 presentase capaian NTN sebesar 101,70% dan mengalami kenaikan menjadi 106,12% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, presentase capaian NTN provinsi Sumatera Selatan kembali mengalami kenaikan menjadi 114,26% dan pada tahun 2024 presentase capaian NTN mengalami penurunan sebesar 112,37%, dan pada tahun 2025 NTN kembali mengalami penurunan sebesar 98,36 % hal ini diakibatkan karena terjadinya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga dan logistik melaut,

seperti bahan bakar, es batu, juga perbekalan, dan faktor cuaca dan musim yang mempengaruhi jumlah hari melaut sehingga pendapatan nelayan belum optimal.

Tabel 11. Perbandingan NTN Provinsi Sumatera Selatan dengan Standar Nasional Tahun 2025

2025		NASIONAL (2025)
TARGET	REALISASI	REALISASI
117,50	115,57	103,03

NTN Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 mencapai 115,57. Nilai tersebut belum melampaui NTN target tahun 2024 yaitu sebesar 117,50. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian ini masih jauh diatas target nasional 103,03, yang menunjukkan bahwa secara umum daya beli nelayan berada pada kondisi cukup baik dan masih dalam kategori surplus.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai NTN antara lain :

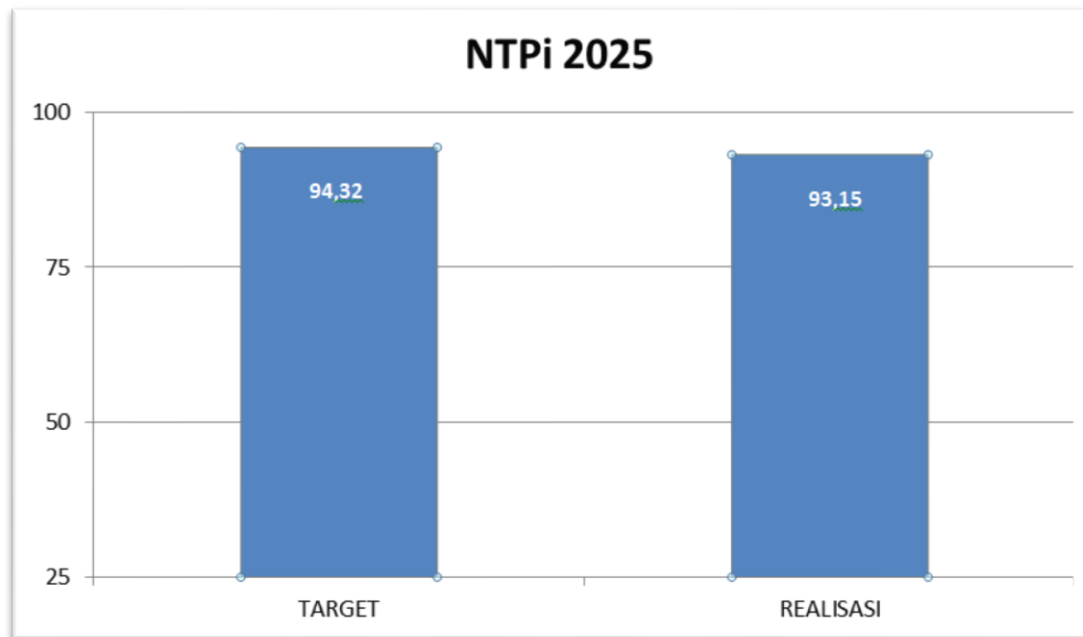
1. Penyaluran bantuan sarana prasarana perikanan tangkap.
2. Fasilitasi akses BBM bersubsidi.
3. Penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi untuk menekan biaya produksi dan memperkuat posisi tawar.

2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pengertian NTPi dengan NTN tidak jauh berbeda, baik NTPi maupun NTN merupakan perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan. Perbedaannya hanya pada pelakunya yakni disatu sisi nelayan dan disisi lain pembudidaya.

NTPi Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebesar 93,15 dengan presentase capaian senilai 98,76 % dari angka yang ditargetkan yaitu 94,32. Capaian NTPi 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan signifikan harga pakan, benih, dan obat-obatan budidaya, fluktuasi harga jual ikan ditingkat

pembudidaya yang cenderung tidak stabil dan masih terbatasnya akses pembudidaya terhadap teknologi budidaya efisein dan pasar yang lebih luas.



Gambar 7. Target dan Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2025

Beberapa Alternatif solusi yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Fasilitasi bantuan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yaitu benih ikan Lele, benih ikan Patin, benih ikan Gabus, Pakan, mesin cetak pakan, mesin sedot lumpur, selang buang, selang hisap, kolam bioflok terpal, kincir tambak udang, waring dan keramba jaring apung.
- 2) Pendampingan teknis budidaya untuk meningkatkan produktivitas.
- 3) Pembinaan kelompok pembudidaya agar terhubung dengan pasar.

Berdasarkan hal tersebut bahwa NTPi masih berada dibawah angka ideal yaitu 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembudidaya ikan masih mengalami tekanan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima. Oleh sebab itu strategi untuk meningkatkan nilai tukar pembudidaya ikan perlu ditetapkan. Hal yang dapat dilakukan adalah mendorong peningkatan daya serap hasil produksi pembudidaya ikan. Dalam kondisi saat ini mendorong industri perikanan untuk tetap menyerap hasil produksi dari nelayan, lalu meningkatkan produksi dan distribusi dasar mandiri dan memberikan

bantuan pakan. Hal ini dimaksudkan agar pasokan pakan ikan bagi para pembudidaya ikan kecil dapat terdistribusikan dengan baik, terlebih harga pakan ikan produksi pabrik saat ini terus mengalami peningkatan.

Ada beberapa bantuan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota terutama yang memiliki perikanan budidaya paling banyak yaitu ; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau serta penambahan pemberian bantuan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa hal tersebut diatas dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tukar pembudidaya ikan sehingga pemerintah dapat mencapai nilai tukar yang ditargetkan pada tahun 2025.

Seperti halnya NTN, NTPi Provinsi Sumatera Selatan juga dilakukan pengukuran dengan membandingkan capaian dari tahun 2021. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil budidaya terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Secara definitif, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun perbandingan nilai NTPi yang dicapai oleh Sumatera Selatan dari tahun 2021 sampai 2025 tersaji pada tabel berikut.

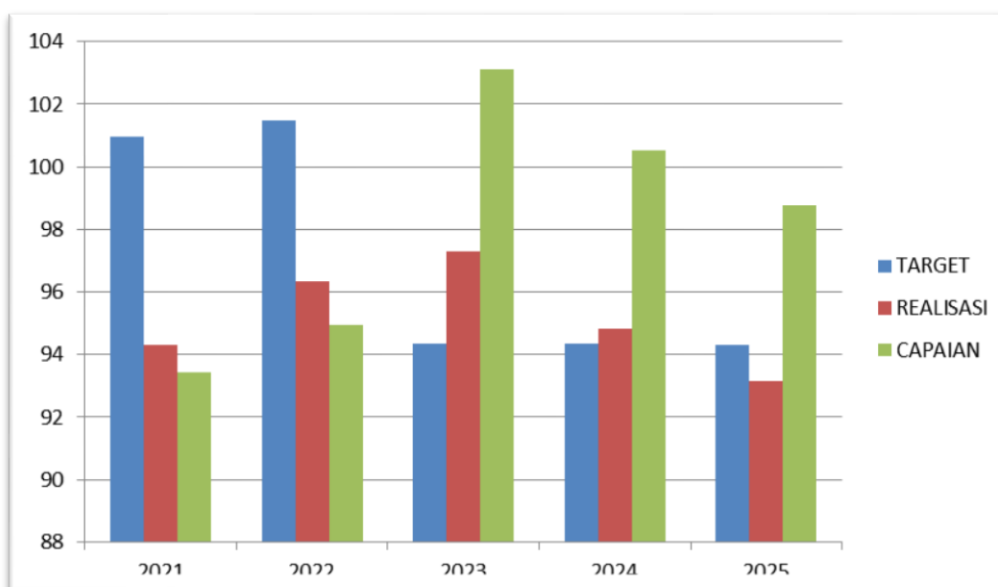
Tabel 12. Perbandingan NTPi dari tahun 2021 sampai 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
100,96	94,32	101,46	96,33	94,35	97,29	94,35	94,84	94,32	93,15
93,42%		94,94%		103,11%		100,51%		98,76	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai NTPi pada tahun 2021 dicapai pada angka 94,32 dan sesuai dengan target yang

ditetapkan pada tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2022 NTPi mengalami kenaikan sebesar 96,33. NTPi tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 97,29 dari target yang ditetapkan sebesar 94,35. Pada tahun 2024 NTPi mengalami kenaikan menjadi 94,84. Tahun 2025 NTPi mengalami penurunan menjadi 93,15 dikarenakan kenaikan signifikan harga pakan, benih, dan obat-obatan budidaya, fluktuasi harga jual ikan ditingkat pembudidaya yang cenderung tidak stabil dan masih terbatasnya akses pembudidaya terhadap teknologi budidaya efisien dan pasar yang lebih luas.

Gambar 8. NTPi Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 presentase capaian NTPi sebesar 93,42 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 94,94 %. Pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 103,11% Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 100,51% dan tahun 2025 menjadi 98,76%.

Tabel 13. Perbandingan NTPi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025

2025		NASIONAL
TARGET	REALISASI	REALISASI
94,32	93,15	105,77

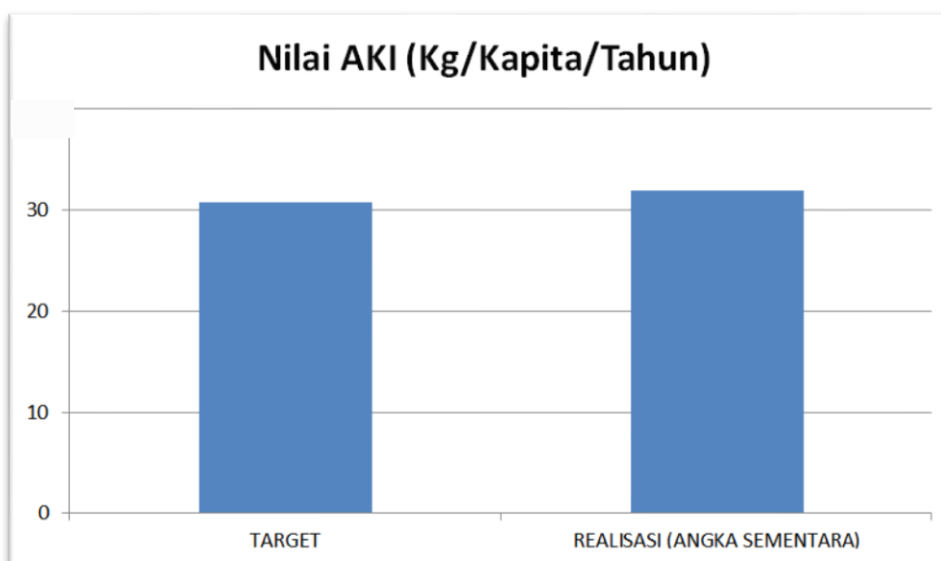
NTPi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai 93,15 dari target daerah 94,32. Namun nilai ini masih berada dibawah angka 100, serta lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 105,55, Hal ini

mengindikasikan bahwa pembudidaya ikan masih menghadapi tekanan biaya produksi yang relatif tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima.

3. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun. Angka Konsumsi Ikan untuk tahun 2025 masih berupa angka sementara dikarenakan perhitungan belum selesai dilaksanakan, angka sementara AKI 2025 yaitu 31,9 Kg/ Kap/ Tahun, angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 30,76 Kg/ Kap/ Tahun. Berikut grafik perbandingan antara target dan realisasi Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025 (angka Sementara)

Gambar 9. Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025



Selama 5 tahun terakhir (2021 – 2025) Angka Konsumsi Ikan naik setiap tahunnya walaupun naiknya belum signifikan, hal ini dikarenakan peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang terus mempromosikan Gemarikan (gerakan memasyarakatkan makan ikan). Berikut table Angka Konsumsi Ikan dari tahun 2021– 2025.

Tabel 14. Perbandingan Nilai AKI dari Tahun 2021 - 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
43,00	42,84	43,5	43,02	44,00	44,05	44,00	46,16	30,76	31,9
99,62%		98,89%		100,11%		104,90%		103,70	

Berdasarkan tabel di atas Angka Konsumsi Ikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2025 Angka Konsumsi Ikan terlihat mengalami penurunan yang significant, hal ini disebabkan karna terjadi perubahan pada metode perhitungan AKI. Secara garis besar bahwa realisasi konsumsi ikan tahun berjalan telah melebihi target yang ditetapkan, dengan selisih yang cukup signifikan. Hal ini merupakan capaian positif yang patut diapresiasi, karena konsumsi ikan yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan sektor perikanan lokal. Dimana kedepannya data ini dapat menjadi dasar untuk Menyusun strategi peningkatan produksi dan distribusi ikan, Memperluas edukasi konsumsi ikan ke wilayah dengan AKI rendah dan Menyesuaikan target AKI secara lebih progresif dan realistis

Tabel 15. Perbandingan AKI Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025

2025		NASIONAL
TARGET	REALISASI	REALISASI
30,76	31,9*	26,66

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi	
			Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.251.548.085,00	100,00	94,53	22.925.991.233,00
i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	643.000.000,00	100,00	96,96	Rp 623.481.061,00
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	476.000.000,00	100,00	96,06	Rp 457.239.040,00
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	27.000.000,00	100,00	97,20	Rp 26.245.000,00
3 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	140.000.000,00	100,00	100,00	Rp 139.997.021,00
ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.285.798.000,00	100,00	93,88	Rp 18.105.939.255,00
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.777.800.000,00	100,00	96,11	Rp 16.125.669.255,00
5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.998.000,00	100,00	79,00	Rp 1.959.985.000,00
6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	27.000.000,00	100,00	75,13	Rp 20.285.000,00
iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000,00	100,00	99,71	Rp 101.703.300,00
7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000,00	100,00	99,71	Rp 101.703.300,00
v Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00	100,00	94,83	Rp 218.105.050,00
9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230.000.000,00	100,00	94,83	Rp 218.105.050,00
vi Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.004.967.335,00	100,00	99,71	1.999.216.332,00
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00	100,00	99,07	Rp 118.889.325,00
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.000.000,00	100,00	99,99	Rp 295.964.883,00
12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348.967.335,00	100,00	99,73	Rp 348.035.975,00
13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.000.000,00	100,00	99,96	Rp 264.896.150,00
14 Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000,00	100,00	99,63	Rp 219.180.000,00
15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.000.000,00	100,00	99,64	Rp 752.249.999,00
vii Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.000.000,00	100,00	93,05	Rp 1.037.487.064,00
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	682.000.000,00	100,00	91,07	Rp 621.087.064,00
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.000.000,00	100,00	96,17	Rp 416.400.000,00
viii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	870.782.750,00	100,00	96,47	Rp 840.059.171,00
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	510.900.000,00	100,00	97,09	Rp 496.008.726,00
19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.882.750,00	100,00	100,00	Rp 9.882.750,00
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	100.000.000,00	100,00	98,50	Rp 98.500.000,00
21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	250.000.000,00	100,00	94,27	Rp 235.667.695,00

II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL		351.350.000,00	100,00	98,86	Rp	347.352.600,00
	i	Kegiatan Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak	315.000.000,00	100,00	98,80	Rp	311.232.600,00
	22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	35.000.000,00	100,00	99,95	Rp	34.982.600,00
	23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	280.000.000,00	100,00	98,66	Rp	276.250.000,00
	ii	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.350.000,00	100,00	99,37	Rp	36.120.000,00
	24	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	36.350.000,00	100,00	99,37	Rp	36.120.000,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		2.692.415.000,00	100,00	98,89		2.662.606.865,00
	i	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan	700.000.000,00	100,00	99,30	Rp	695.124.152,00
	25	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	700.000.000,00	100,00	99,30	Rp	695.124.152,00
	ii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	1.738.770.000,00	100,00	99,06		1.722.350.413,00
	26	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	38.770.000,00	100,00	88,99	Rp	34.500.000,00
	27	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.700.000.000,00	100,00	99,29	Rp	1.687.850.413,00
	iii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	36.700.000,00	100,00	78,96	Rp	28.980.000,00
	28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	36.700.000,00	100,00	78,96	Rp	28.980.000,00
	iv	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan	216.945.000,00	100,00	99,63	Rp	216.152.300,00
	30	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	216.945.000,00	100,00	99,63	Rp	216.152.300,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		4.094.264.000,00	100,00	99,74		4.083.783.351,00
	i	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	28.200.000,00	100,00	99,82	Rp	28.150.000,00
	31	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!	Rp	-
	32	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan	28.200.000,00	100,00	99,82	Rp	28.150.000,00
	ii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	100,00	98,62	Rp	216.953.000,00
	33	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	100,00	98,62	Rp	216.953.000,00
	34	Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!	Rp	-
	iii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.846.064.000,00	100,00	99,81	Rp	3.838.680.351,00
	35	Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas	50.000.000,00	100,00	99,68	Rp	49.839.000,00
	36	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas	3.796.064.000,00	100,00	99,81	Rp	3.788.841.351,00
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		569.655.000,00	100,00	98,59	Rp	561.634.845,00
	i	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai	535.905.000,00	100,00	99,19	Rp	531.540.785,00
	37	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha pengangkutan ikan	112.000.000,00	100,00	99,38	Rp	111.306.185,00
	38	Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	423.905.000,00	100,00	99,13	Rp	420.234.600,00
	ii	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,	33.750.000,00	100,00	89,17		30.094.060
	39	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/ atau Usaha pengolahan	11.250.000,00	100,00	81,24		9.139.060
	40	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ Atau usaha pengangkutan ikan di	11.250.000,00	100,00	86,53		9.735.000
	41	Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk,	11.250.000,00	100,00	99,73		11.220.000
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.388.106.000,00	100,00	96,88	Rp	1.344.860.144,00
	i	Kegiatan Penerbitan izin Usaha pemasaran dan Pengolahan Hasil	170.000.000,00	100,00	99,09	Rp	168.445.040,00
	42	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	170.000.000,00	100,00	99,09	Rp	168.445.040,00
	ii	Kegiatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha	820.280.000,00	100,00	95,49	Rp	783.250.867,00
	43	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap	400.000.000,00	100,00	90,88	Rp	363.532.367,00
	44	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha	420.280.000,00	100,00	99,87	Rp	419.718.500,00
	iii	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	397.826.000,00	100,00	98,83		393.164.237,00
	45	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/	397.826.000,00	100,00	98,83		393.164.237,00
	Jumlah : 34 kegiatan		33.347.338.085,00	100,00	95,74	Rp	31.926.229.038,00

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** dan **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)** tahun 2025 telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip **efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya**, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana.

Dari sisi **penggunaan anggaran**, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program-program yang bersifat langsung mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, seperti bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta fasilitasi akses pasar. Strategi ini memungkinkan ketercapaian output yang relatif optimal tanpa memerlukan penambahan alokasi anggaran yang signifikan. Dengan kata lain, capaian indikator dapat diraih melalui **pemanfaatan anggaran yang proporsional dan tepat sasaran**.

Dari sisi **sumber daya manusia**, optimalisasi peran penyuluh perikanan dan tenaga teknis menjadi faktor penting dalam efisiensi kinerja. Pendekatan pendampingan kelompok dan integrasi kegiatan lintas program mengurangi duplikasi aktivitas serta meningkatkan jangkauan pelayanan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan tanpa harus menambah jumlah personel secara signifikan.

Sementara itu, dari sisi **pemanfaatan sarana dan prasarana**, kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti balai penyuluhan, sentra produksi, serta sistem informasi dan data sektoral. Penggunaan teknologi informasi dalam pendataan dan monitoring juga berkontribusi pada penghematan waktu, biaya operasional, serta peningkatan akurasi data.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai capaian kinerja yang mendekati target dengan dukungan anggaran dan sumber daya yang relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program telah disusun secara realistis, pelaksanaan kegiatan terfokus pada prioritas, serta koordinasi antar unit kerja berjalan dengan baik sehingga menghasilkan **kinerja yang efektif dan berbiaya efisien**.

Tabel 17. Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,50	115,57	98,36	2.692.415.000,00	2.662.606.865,00	98,89	-0,53
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	94,32	93,15	98,76	4.094.264.000,00	4.083.783.351,00	99,74	-0,98
4	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	30,76	31,9	103,70	1.388.106.000,00	1.344.860.144,00	96,88	6,82

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi		Tingkat Efisiensi
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.251.548.085,00	100,00	94,53	22.925.991.233,00	99%
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	643.000.000,00	100,00	96,96	Rp 623.481.061,00	99%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	476.000.000,00	100,00	96,06	Rp 457.239.040,00	99%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	27.000.000,00	100,00	97,20	Rp 26.245.000,00	99%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	140.000.000,00	100,00	100,00	Rp 139.997.021,00	99%
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.285.798.000,00	100,00	93,88	Rp 18.105.939.255,00	99%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.777.800.000,00	100,00	96,11	Rp 16.125.669.255,00	99%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.998.000,00	100,00	79,00	Rp 1.959.985.000,00	99%
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	27.000.000,00	100,00	75,13	Rp 20.285.000,00	99%
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000,00	100,00	99,71	Rp 101.703.300,00	99%
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000,00	100,00	99,71	Rp 101.703.300,00	99%
v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00	100,00	94,83	Rp 218.105.050,00	99%
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230.000.000,00	100,00	94,83	Rp 218.105.050,00	99%
vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.004.967.335,00	100,00	99,71	1.999.216.332,00	99%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00	100,00	99,07	Rp 118.889.325,00	99%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.000.000,00	100,00	99,99	Rp 295.964.883,00	99%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348.967.335,00	100,00	99,73	Rp 348.035.975,00	99%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.000.000,00	100,00	99,96	Rp 264.896.150,00	99%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000,00	100,00	99,63	Rp 219.180.000,00	99%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.000.000,00	100,00	99,64	Rp 752.249.999,00	99%
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.000.000,00	100,00	93,05	Rp 1.037.487.064,00	99%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	682.000.000,00	100,00	91,07	Rp 621.087.064,00	99%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.000.000,00	100,00	96,17	Rp 416.400.000,00	99%
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	870.782.750,00	100,00	96,47	Rp 840.059.171,00	99%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	510.900.000,00	100,00	97,09	Rp 496.008.726,00	99%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.882.750,00	100,00	100,00	Rp 9.882.750,00	99%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	100.000.000,00	100,00	98,50	Rp 98.500.000,00	99%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	250.000.000,00	100,00	94,27	Rp 235.667.695,00	99%
II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL	351.350.000,00	100,00	98,86	Rp 347.352.600,00	99%
i	Kegiatan Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak	315.000.000,00	100,00	98,80	Rp 311.232.600,00	99%
22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	35.000.000,00	100,00	99,95	Rp 34.982.600,00	99%
23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	280.000.000,00	100,00	98,66	Rp 276.250.000,00	99%
ii	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.350.000,00	100,00	99,37	Rp 36.120.000,00	99%
24	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	36.350.000,00	100,00	99,37	Rp 36.120.000,00	99%

III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		2.692.415.000,00	100,00	98,89	2.662.606.865,00	99%
	i	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan	700.000.000,00	100,00	99,30	Rp 695.124.152,00	99%
	25	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	700.000.000,00	100,00	99,30	Rp 695.124.152,00	99%
	ii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	1.738.770.000,00	100,00	99,06	1.722.350.413,00	99%
	26	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	38.770.000,00	100,00	88,99	Rp 34.500.000,00	99%
	27	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.700.000.000,00	100,00	99,29	Rp 1.687.850.413,00	99%
	iii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	36.700.000,00	100,00	78,96	Rp 28.980.000,00	99%
	28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	36.700.000,00	100,00	78,96	Rp 28.980.000,00	99%
	iv	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan	216.945.000,00	100,00	99,63	Rp 216.152.300,00	99%
	30	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	216.945.000,00	100,00	99,63	Rp 216.152.300,00	99%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		4.094.264.000,00	100,00	99,74	4.083.783.351,00	99%
	i	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	28.200.000,00	100,00	99,82	Rp 28.150.000,00	99%
	31	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!	Rp -	99%
	32	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan	28.200.000,00	100,00	99,82	Rp 28.150.000,00	99%
	ii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	100,00	98,62	Rp 216.953.000,00	99%
	33	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	100,00	98,62	Rp 216.953.000,00	99%
	34	Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!	Rp -	99%
	iii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.846.064.000,00	100,00	99,81	Rp 3.838.680.351,00	99%
	35	Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas	50.000.000,00	100,00	99,68	Rp 49.839.000,00	99%
	36	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas	3.796.064.000,00	100,00	99,81	Rp 3.788.841.351,00	99%
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		569.655.000,00	100,00	98,59	Rp 561.634.845,00	99%
	i	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai	535.905.000,00	100,00	99,19	Rp 531.540.785,00	99%
	37	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha pengangkutan ikan	112.000.000,00	100,00	99,38	Rp 111.306.185,00	99%
	38	Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	423.905.000,00	100,00	99,13	Rp 420.234.600,00	99%
	ii	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,	33.750.000,00	100,00	89,17	30.094.060	99%
	39	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/ atau Usaha pengolahan	11.250.000,00	100,00	81,24	9.139.060	99%
	40	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ Atau usaha pengangkutan ikan di	11.250.000,00	100,00	86,53	9.735.000	99%
	41	Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk,	11.250.000,00	100,00	99,73	11.220.000	99%
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.388.106.000,00	100,00	96,88	Rp 1.344.860.144,00	99%
	i	Kegiatan Penerbitan izin Usaha pemasaran dan Pengolahan Hasil	170.000.000,00	100,00	99,09	Rp 168.445.040,00	99%
	42	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	170.000.000,00	100,00	99,09	Rp 168.445.040,00	99%
	ii	Kegiatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha	820.280.000,00	100,00	95,49	Rp 783.250.867,00	99%
	43	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap	400.000.000,00	100,00	90,88	Rp 363.532.367,00	99%
	44	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha	420.280.000,00	100,00	99,87	Rp 419.718.500,00	99%
	iii	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	397.826.000,00	100,00	98,83	393.164.237,00	99%
	45	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/	397.826.000,00	100,00	98,83	393.164.237,00	99%
Jumlah : 45 kegiatan			33.347.338.085,00	100,00	95,74	Rp 31.926.229.038,00	

BAB IV. PENUTUP

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah tujuan dasar dilakukannya pembangunan pada sektor ini. Pemanfaatan secara optimal potensi yang dimiliki oleh Sumatera selatan, khususnya perairan umum daratan (PUD) adalah upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dengan tetap menjaga kelestariannya. Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus pada bidang pembangunan kelautan dan perikanan ini antara lain adalah : peningkatan produksi baik dibidang budidaya maupun tangkap, peningkatan pendapatan pelaku usaha (NTN dan NTPI), ekspor produk kelautan dan perikanan Sumatera Selatan serta Angka Konsumsi Ikan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan perhatian kepada pengendalian dan pengelolaan sumber daya perairan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pengawasan lingkungan. Pengelolaan lingkungan perairan juga mengikut sertakan peran aktif masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil yang lebih baik. Upaya ini dilakukan guna menjaga kelestarian sumberdaya di masa mendatang.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Nilai tukar nelayan merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat **nelayan**, apakah mampu menutupi pengeluaran dengan

pendapatannya dan tingkat kesejahteraan **nelayan** sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Pada tahun 2025 NTN di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari tahun 2024 hal ini diakibatkan karena terjadinya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga dan logistik melaut, seperti bahan bakar, es batu, juga perbekalan, dan faktor cuaca dan musim yang mempengaruhi jumlah hari melaut sehingga pendapatan nelayan belum optimal namun NTN Provinsi Sumatera Selatan sudah melebihi NTN Nasional yaitu 103,03. Untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2025 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, untuk itu diharapkan pada tahun yang akan datang lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan NTPi dengan meningkatkan produksi Perikanan Budidaya melalui bantuan yang diberikan, sosialisasi dan pelatihan di Bidang Pembudidayaan Ikan. Diharapkan pada tahun yang akan datang Komoditas Perikanan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat di perhitungkan keberadaanya. Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun, diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaiknya.